



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Public Private Partnership dalam Pendidikan Vokasi: Peran Ketua Rukun Tetangga pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili di Perumnas Klender

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto¹, Kadarisman², Evis Satispi³, Azhari Aziz Samudra⁴

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, hanyaujianini@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, kadarisman.bkn@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, evi.satispi@umj.ac.id

⁴Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, azhariazis.samudra@umj.ac.id

Corresponding Author: hanyaujianini@gmail.com¹

Abstract: *The Public Private Partnership Scheme is a strategic public policy adopted by environmental policy actors in the Neighborhood Association (RT) 05 RW 05, Malaka Sari Village, Perumnas Klender, Duren Sawit District, East Jakarta, on the Admission of New Students (PPDB) for Private Vocational High Schools in the domicile route. As a form of appreciation for PPDB, the administrators of the Rukun Tetangga 05 RW 05 Malaka Sari Village – Duren Sawit District – Perumnas Klender East Jakarta made an agenda for setting PPDB policies for Private Vocational High Schools Domicile with Private Vocational Schools through the Public Private Partnership scheme. Public Private Partnership on PPDB Vocational Education for Private Vocational Schools in the domicile path is carried out through data and information collection using qualitative research methods with phenomenological studies regarding awareness of human experience and social interaction, and to find out how the motives, actions, and meanings of Alfred Schutz's phenomenological theory, by analyzing the results of direct interviews with informants totaling 10 people with 6 people from the private vocational school and 1 person students of SMK Nurul Islam, 1 alumni of SMK Malaka, 1 parent/guardian of SMK Tadika Puri, 1 person head of RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari, East Jakarta. From the results of the interview, a policy setting agenda was carried out to make a policy with the size of the plot of private problems becoming public problems as policy objectives. This study questions "to what extent is the role of the Neighborhood Association institutional policy actors in vocational education with the agenda of setting policies for the Public Private Partnership scheme of PPDB Private Vocational Schools with Domicile Lines at Perumnas Klender, East Jakarta to provide democratic effectiveness in the community to educate the nation's children by achieving value goals. policy value?"*

Keyword: *Policy Actors, PPDB, Public Private Partnership, Agenda Setting, Domicile Path*

Abstrak: Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership) merupakan kebijakan publik strategis yang dianut oleh para aktor kebijakan lingkungan di Rukun Tetangga

(RT) 05 RW 05, Kelurahan Malaka Sari, Perumnas Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta jalur domisili. Sebagai bentuk apresiasi terhadap PPDB, pengurus Rukun Tetangga 05 RW 05 Desa Malaka Sari - Kecamatan Duren Sawit - Perumnas Klender Jakarta Timur menjadwalkan agenda pengaturan kebijakan PPDB untuk SMK Swasta Jalur Domisili dengan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta. Kerjasama Pemerintah Swasta pada PPDB Pendidikan Kejuruan untuk SMK Swasta jalur domisili dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi fenomenologis mengenai kesadaran tentang pengalaman manusia dan interaksi sosial, dan untuk mengetahui bagaimana motif, tindakan, dan makna teori fenomenologi Alfred Schutz, dengan menganalisis hasil wawancara langsung dengan informan sejumlah 10 orang dengan 6 orang dari SMK Swasta dan 1 orang siswa SMK Nurul Islam, 1 alumni SMK Malaka, 1 orang orang tua/wali SMK Tadika Puri, 1 orang kepala RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur. Dari hasil wawancara tersebut, dilakukan agenda pengaturan kebijakan untuk membuat kebijakan dengan ukuran plot persoalan swasta menjadi masalah publik sebagai tujuan kebijakan. Penelitian ini mengajukan pertanyaan "sejauh mana peran aktor kebijakan lembaga Rukun Tetangga dalam pendidikan kejuruan dengan agenda pengaturan kebijakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta PPDB SMK Swasta dengan Jalur Domisili di Perumnas Klender, Jakarta Timur untuk memberikan efektifitas demokrasi dalam masyarakat untuk mendidik anak bangsa dengan mencapai nilai tujuan kebijakan nilai?"

Kata Kunci: Aktor Kebijakan, PPDB, *Public Private Partnership*, Agenda Setting, Jalur Domisili

PENDAHULUAN

Penelitian ini menggali dinamika kebijakan pendidikan vokasi di lingkungan Perumnas Klender, Jakarta Timur, dengan fokus pada peran pengurus Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 dalam memecahkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership/PPP*). Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi, pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun keterbatasan jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Duren Sawit menjadi tantangan yang signifikan.

Perubahan fisik dan sosial yang terjadi di Perumnas Klender seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat membawa dampak terhadap kebutuhan pendidikan. Proses urbanisasi, yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi, memperkuat permintaan terhadap layanan pendidikan yang lebih bervariasi, termasuk pendidikan vokasi. Sebagai dampaknya, kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan menengah, khususnya SMK yang dapat memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, semakin mendesak. Di sisi lain, terbatasnya jumlah SMK Negeri yang dapat menampung lulusan SMP di Kecamatan Duren Sawit memperburuk ketimpangan pendidikan, sehingga menuntut adanya solusi alternatif.

Pengurus RT 05 RW 05 Kelurahan Malaka Sari memiliki peran sentral dalam menanggulangi masalah PPDB, khususnya dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak warga Perumnas Klender yang tidak mendapatkan kuota di SMK Negeri. RT tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara warga dan pemerintah, tetapi juga menjembatani hubungan dengan berbagai SMK swasta yang ada di sekitar lingkungan, seperti SMK Tadika Puri, SMK Teratai Putih, dan SMK Nurul Islam. Melalui koordinasi yang intensif, pengurus

RT membantu memfasilitasi informasi mengenai pilihan sekolah, prosedur pendaftaran, serta program beasiswa yang dapat diakses oleh masyarakat.

Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kuota di SMK Negeri. Melalui skema ini, pemerintah daerah, melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, memberikan akses finansial kepada keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di SMK swasta. Skema PPP ini memungkinkan sekolah swasta untuk menerima siswa dari lingkungan sekitar dengan biaya yang lebih terjangkau, serta menyediakan akses pendidikan vokasi yang berkualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada SMK Negeri.

Meskipun skema ini menawarkan solusi praktis, implementasinya membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, SMK swasta, dan masyarakat, dalam menjamin bahwa program ini dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi siswa yang terpinggirkan oleh keterbatasan kuota di SMK Negeri. Dengan demikian, PPP di sektor pendidikan vokasi berperan penting dalam memperluas akses dan memperbaiki kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Penelitian ini berlandaskan pada teori kebijakan publik dan teori aktor kebijakan, yang menekankan pentingnya peran aktor nonformal, seperti pengurus RT, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Menurut Muthmainnah (2017), aktor nonformal, seperti masyarakat dan lembaga komunitas, berperan penting dalam menciptakan solusi praktis dan lokal terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Peran pengurus RT sebagai aktor kebijakan nonformal dapat mempercepat penerapan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan pendidikan vokasi, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan skema PPP. Pengurus RT tidak hanya bertindak sebagai penghubung informasi, tetapi juga sebagai motivator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan pendidikan di lingkungan mereka dapat mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Dengan adanya skema PPP dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan vokasi yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

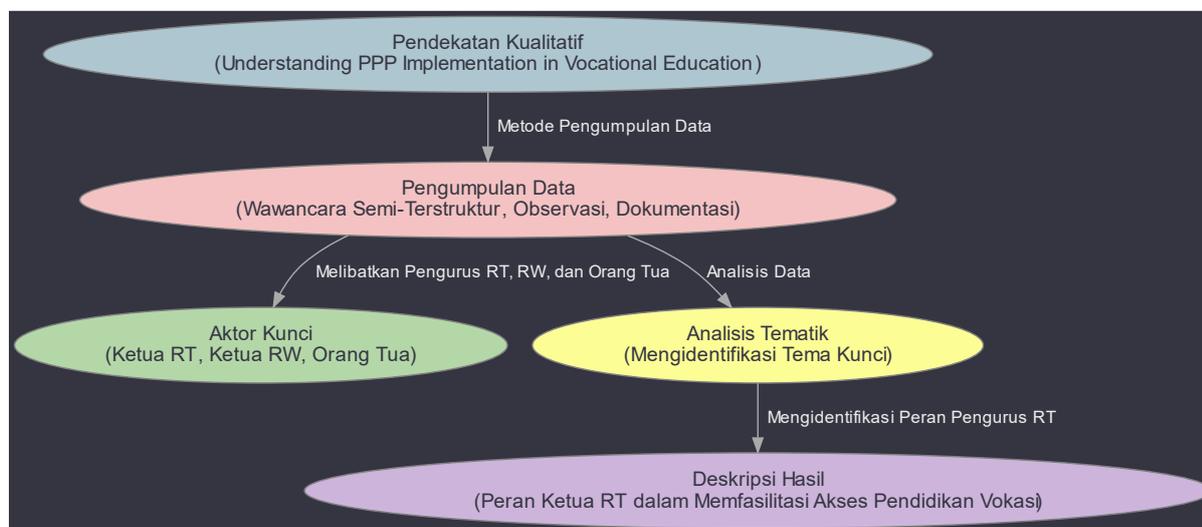
Penelitian ini menunjukkan bahwa skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) dan peran aktif pengurus RT dalam menciptakan solusi PPDB di SMK swasta di Perumnas Klender dapat meningkatkan akses pendidikan vokasi bagi siswa di lingkungan tersebut. Meskipun tantangan dalam pemenuhan kuota di SMK Negeri masih ada, keberadaan PPP memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan jalur domisili mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan yang lebih inklusif dapat mempercepat pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika implementasi Public Private Partnership (PPP) dalam pendidikan vokasi di Perumnas Klender, dengan fokus pada peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK swasta jalur domisili. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang melibatkan pengurus RT, Ketua RW, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan peran pengurus RT dalam memfasilitasi akses pendidikan vokasi melalui skema PPP. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pengurus RT sebagai

aktor kebijakan nonformal yang berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi di komunitas tersebut.

Sumber: Hasil Riset



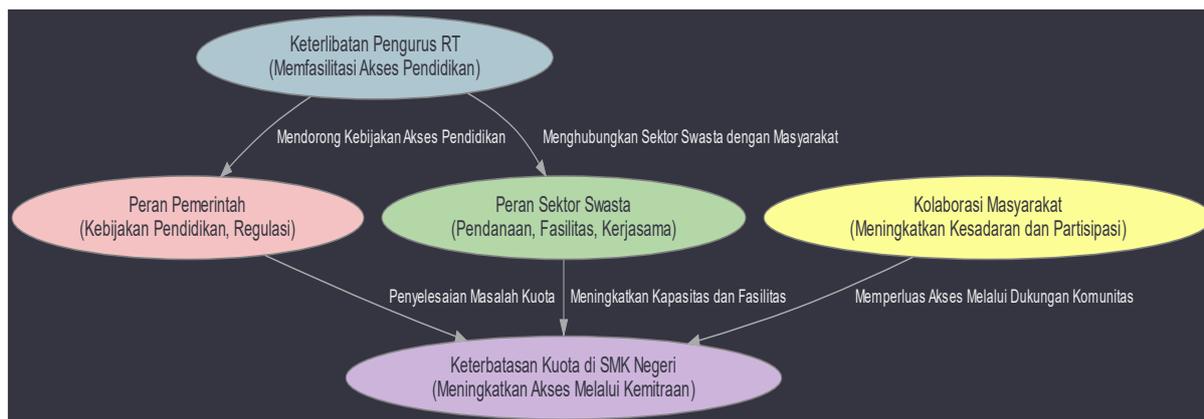
Gambar 1. Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kualitatif: Peran Pengurus RT 05 RW 05 dalam Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Swasta

1. Tema Utama

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran pengurus Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 di Perumnas Klender, Jakarta Timur, dalam mengatasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta melalui Public Private Partnership (PPP). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keterlibatan pengurus RT dan kolaborasi antara pihak pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, dapat memecahkan masalah keterbatasan kuota di SMK Negeri dan meningkatkan akses pendidikan vokasi bagi warga. “...Kemudian di sisi lain, terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pentingnya menyadari keterbatasan-keterbatasan ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi model manajemen yang lebih inovatif atau mencari solusi yang efektif, seperti mencari kemitraan dengan sektor swasta, (Dewi & Tuswoyo, 2020; Fatmawati, 2011; Indahsari et al, 2022; Isril et al, 2018; Nahrudin, 2016; Patria et al, 2018) Kemudian, penting adanya pengukuran hasil pelayanan publik untuk menilai sejauh mana suksesnya suatu organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran ini mencakup evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan sektor privat atau masyarakat.



Gambar 2. Pengukuran hasil pelayanan publik

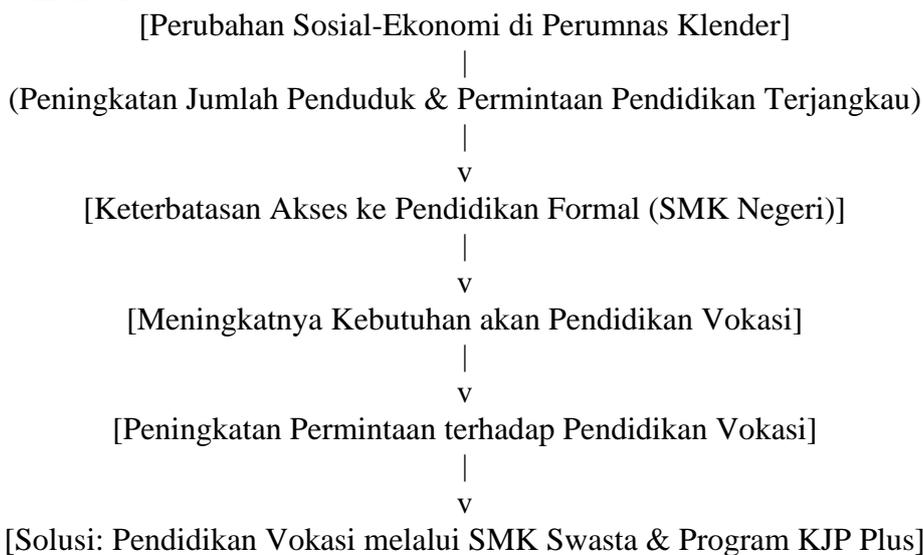
2. Pola-Pola Temuan

Berdasarkan analisis data, ditemukan beberapa pola yang relevan dengan peran pengurus RT dan implementasi skema PPP di Perumnas Klender:

Perubahan Sosial-Ekonomi dan Kebutuhan Pendidikan Vokasi

Perubahan sosial-ekonomi di Perumnas Klender, terutama peningkatan jumlah penduduk dan permintaan akan pendidikan yang lebih terjangkau, mendorong kebutuhan masyarakat akan pendidikan vokasi.

Diagram Alur: Pengaruh Perubahan Sosial-Ekonomi terhadap Kebutuhan Pendidikan Vokasi di Perumnas Klender



Sumber: Hasil Riset

Gambar 3. Pengaruh Perubahan Sosial-Ekonomi terhadap Kebutuhan Pendidikan Vokasi di Perumnas Klender

Namun, keterbatasan jumlah SMK Negeri menyebabkan banyak siswa kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan jalur mereka. “Peran lembaga pendidikan vokasi diantaranya adalah untuk dapat memberikan kontribusi dengan melakukan peningkatan softskills, hardskills dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan penggunaan teknologi agar memiliki daya saing (Verawadina, Jalinus, & Asnur, 2019). Pendidikan vokasi juga berfungsi sebagai pendorong lulusan-lulusannya agar mampu menjadi tangguh dan mandiri sehingga akan menjadi lebih siap ketika masuk ke dunia kerja dan pada akhirnya mampu turut serta membantu mensejahterakan bangsa (Raharja, 2019). Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami jika pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam

menghasilkan individu atau sumber daya manusia yang siap untuk turun pada dunia industri dan dunia kerja.”

Peran Pengurus RT sebagai Penghubung

Pengurus RT 05 RW 05 berperan sebagai mediator antara warga dan pemerintah. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan antara warga dengan sekolah-sekolah swasta di sekitar lingkungan Perumnas Klender, membantu mencari solusi bagi keluarga yang tidak dapat diterima di SMK Negeri. “...RT/RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah (<https://jt.ft.ung.ac.id/index.php/jt> Hal. | 43) kemasyarakatan yang dihadapi warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat (Zuhdi dkk, 2019)...”

Skema PPP sebagai Solusi Praktis

Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan kuota di SMK Negeri. Dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan akses finansial kepada siswa melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMK swasta dengan biaya yang lebih terjangkau. “...Terdapat beberapa alasan dilaksana-kannya kemitraan antara pemerintah dan swasta. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) menyatakan bahwa kemitraan yang dijalankan mengandung beberapa alasan: 1) untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien; 2) memecahkan masalah dengan berbagai sektor, sumberdaya, dan solusi yang terintegrasi; 3) menciptakan win-win solution antar sektor yang terlibat; 4) membuka proses pengambilan keputusan yang lebih luas pada barang/jasa publik. Alasan tersebut sejalan dengan pendapat Torchia et al, (2015) bahwa kemitraan membahas mengenai efektivitas, efisiensi, manfaat dan jejaring antar aktor...”

Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Implementasi PPP

Implementasi skema PPP memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah swasta, maupun masyarakat. “...Selanjutnya Indiahono (2009, p. 143) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan menunjuk pada sebuah aktivitas menjalankan suatu kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang organ pemerintah yang melaksanakan maupun menentukan para pihak dalam sebuah kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Teori Implementasi Kebijakan dari Merille S. Grindle (2017). Pengurus RT berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses komunikasi antara pihak-pihak terkait agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi PPP. Masyarakat diharapkan tidak hanya menerima kebijakan yang ada, tetapi juga terlibat dalam mendukung program ini melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti pengawasan dan pemberian feedback. “...Kebijakan PPP dapat diukur berjalan baik dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dasar seperti dibawah ini (Nugroho & Toyib, 2018) yakni : (1) Apakah kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan bangsa atau visi nasional, atau tujuan dari elite politik , apakah kebijakan itu dibuat benar-benar untuk kepentingan bangsa atau kepentingan pribadi dan golongan yang disembunyikan dibalik kepentingan bangsa ; (2) Apakah kebijakan tersebut telah memberikan secara secukupnya hak dan kewenangan, tidak kurang dan tidak lebih, pemerintah kepada sektor swasta atau pelaku usaha, atau justru mengambil hak dan kewenangan pemerintah secara berlebihan sehingga pelaku bisnis dapat bertindak sewenang-wenang secara sak, baik secara tidak langsung maupun melalui tangan pemerintah; (3) Apakah kebijakan tersebut benar-benar menggerakkan masyarakat, memperkuat pasar, dan mengurangi batasan-batasan aturan yang tidak relevan, atau justru membuat pergerakan masyarakat terkunci, pasar menjadi tidak kompetitif, dan aturan makin memberatkan karena

ditujukan untuk mendukung monopoli yang diberikan kepada pelaku usaha atas nama kebijakan PPP; (4) Apakah pada akhirnya terbentuk budaya kemandirian dari masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk menyediakan sendiri kebutuhan infrastrukturnya daripada terus menerus menuntut pemerintah, atau justru akhirnya memperpanjang ketidak mandirian masyarakat. (5) Apakah dengan kebijakan PPP, pemerintah dapat memindahkan anggaran infrastruktur ke anggaran sosial yang lebih memerlukan, atautkan tidak ada relokasi anggaran sama sekali....”

3. Poin-Poin Kunci

Dari hasil analisis, beberapa poin penting yang dapat disarikan adalah:

Peran Pengurus RT sebagai Aktor Kebijakan Nonformal

Pengurus RT bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga sebagai aktor kebijakan nonformal yang memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam masalah pendidikan. “...Implementasi kebijakan juga merupakan sebuah fenomena yang kompleks (Winarno,2012:148), implementasi menjadi kompleks karena dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor dan sumber daya serta adanya berbagai kondisi dalam pelaksanaannya (Grindle, 1980:3). Hasil kajian yang dilakukan oleh Najam, (1995) ;Bayrakal, (2006) ;Martin, (2014); dan Mthethwa, (2017) menunjukkan ada berbagai faktor penting yang berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Najam (1995:12) menguraikan lima faktor penting yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik....”

Skema PPP sebagai Solusi Akses Pendidikan

Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) terbukti menjadi alternatif yang efektif untuk memperluas akses pendidikan vokasi, mengingat terbatasnya kuota di SMK Negeri. “...Paradigma tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik pada waktu itu lebih mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya penyedia layanan. Namun seiring perkembangan zaman pemberian layanan tidak lagi hanya terpusat pada pemerintah, tetapi sudah melibatkan pihak swasta atau privat sector, (Fatmawati, 2011) Kemudian Kemitraan Publik-Privat (Public-Private Partnership atau PPP) adalah suatu bentuk kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek atau layanan publik. Kemitraan ini melibatkan kontribusi dan tanggung jawab dari kedua sektor didasarkan pada kontrak yang secara rinci menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing mitra, Linder dalam (Nahrudin, 2016)....”. Melalui skema ini, siswa yang sebelumnya terkendala akses ke pendidikan dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK swasta.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan skema PPP bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal mendukung kebijakan pendidikan maupun dalam kontribusi langsung terhadap keberlanjutan program. Keterlibatan aktif masyarakat, dalam hal ini melalui pengurus RT, akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima dan efektif di tingkat lokal. “...Partisipasi pada dasarnya merupakan perwujudan asas kekeluargaan yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukkan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Hadawiya et al, 2021). Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari faktor individu masyarakat yang merupakan prasyarat umum terjadinya partisipasi

yang meliputi tingkat kemauan, tingkat kemampuan dan kesempatan (Rahmannuddin & Sumardjo, 2018)....”

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengurus RT 05 RW 05 di Perumnas Klender sangat signifikan dalam membantu memecahkan masalah PPDB di SMK swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP). Meskipun tantangan terkait keterbatasan kuota di SMK Negeri masih ada, skema PPP memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan jalur domisili mereka. Partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan pendidikan maupun dalam pengawasan implementasi, memainkan peran kunci dalam keberhasilan skema ini. Hasil kajian Mthethwa (2012:38) menunjukkan aktor kunci yang berada di lapangan memainkan peran yang penting dalam implementasi kebijakan karena mereka dituntut untuk dapat membuat keputusan saat lansung berhadapan dengan masyarakat....”

Ke depan, perlu adanya upaya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengurus RT untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan vokasi. Beberapa upaya tersebut antara lain, memperkuat kapasitas dan keterampilan aparatur pemerintah daerah, memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Fitrah et al 2021)....”. Pemerintah juga diharapkan untuk terus memperkuat skema PPP agar lebih banyak siswa yang dapat mengakses pendidikan dengan kualitas yang baik dan terjangkau.

Hasil analisis ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masalah pendidikan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif dan keterlibatan aktif masyarakat dapat mempercepat pencapaian tujuan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di lingkungan tersebut.(Jumalia Mannayong. 2024). Pembahasan

1. Relevansi Isu Masalah dengan Teori Perubahan Sosial-Ekonomi

Dalam penelitian ini, isu utama yang diangkat adalah peran pengurus RT 05 RW 05 dalam mengatasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) di Perumnas Klender, Jakarta Timur. “...Dunia digital saat ini semakin merambah pendidikan dan juga keterampilan, teknologi dilakukan dengan tahapan yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi pendidikan, pengetahuan, keterampilan dengan cara yang lebih kreatif dan juga inovatif. Penggunaan teknologi ini telah memberikan kontribusi untuk mengubah pembelajaran dan pengembangan keterampilan menjadi proses seumur hidup (Sari, 2021)....”.

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam hasil kualitatif adalah perubahan sosial-ekonomi yang meningkatkan permintaan terhadap pendidikan vokasi. Namun, keterbatasan kuota di SMK Negeri menjadi tantangan yang signifikan. “...Perbaikan terhadap layanan pendidikan pada umumnya diikuti dengan indeks kepuasan siswa yang tinggi (Putera & Shofiah, 2021; Slamet, 2011). Hal tersebut tentunya dapat mendorong perguruan tinggi vokasi untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui perbaikan tata kelola yang akan diikuti oleh indeks kepuasan stakeholders terhadap lulusan sehingga dapat meningkatkan daya serap lulusan yang Namun, hasil indeks kepuasan siswa yang tinggi harus terus dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan untuk terus maju dan berkembang....”

Teori Perubahan Sosial-Ekonomi (Giddens, 2009) menyatakan bahwa perubahan dalam kondisi sosial-ekonomi, seperti peningkatan pendapatan atau jumlah penduduk, berpotensi mengubah kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Di Perumnas Klender, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan demografi menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap pendidikan vokasi. Namun, keterbatasan kapasitas SMK Negeri menambah kesulitan dalam memenuhi permintaan tersebut. Dalam hal ini, hasil kualitatif menunjukkan bahwa pengurus RT berperan penting sebagai mediator antara warga dan pihak

pemerintah untuk memfasilitasi akses ke SMK swasta, sebuah mekanisme yang mencerminkan solusi adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi yang terjadi.

Hasil analisis kualitatif ini relevan dengan teori perubahan sosial-ekonomi, yang menunjukkan bahwa dinamika sosial dan ekonomi lokal, seperti yang terjadi di Perumnas Klender, memang mendorong kebutuhan baru dalam akses pendidikan. Dengan demikian, peran pengurus RT dalam menghubungkan masyarakat dengan SMK swasta melalui PPP adalah bentuk respons terhadap perubahan ini, serta menunjukkan relevansi teori perubahan sosial-ekonomi dalam memahami fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Peran Pengurus RT sebagai Aktor Kebijakan Nonformal: Teori Peran (Role Theory)

Teori Peran atau Role Theory menjelaskan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan pencapaian tujuan bersama (Biddle, 1986). Dalam konteks penelitian ini, pengurus RT memainkan peran sebagai aktor kebijakan nonformal yang penting dalam proses PPDB, terutama dalam menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun sekolah swasta.

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa pengurus RT tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan penghubung antara pihak sekolah swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan, terutama skema PPP, dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pengurus RT, sebagai tokoh masyarakat yang lebih dekat dengan warga, memiliki peran strategis dalam mengurangi hambatan komunikasi dan memberikan akses kepada keluarga yang membutuhkan informasi tentang PPDB dan bantuan melalui program KJP Plus.

Keterlibatan aktif pengurus RT ini sesuai dengan teori peran yang menggarisbawahi bahwa individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Dalam hal ini, pengurus RT berperan sebagai mediator yang mempermudah warga dalam mendapatkan akses pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

3. Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) dalam Pendidikan: Teori PPP

Teori Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) menyarankan bahwa kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan (Hodge & Greve, 2007). Dalam konteks penelitian ini, hasil kualitatif menunjukkan bahwa skema PPP menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan kuota di SMK Negeri. Melalui skema ini, pemerintah memberikan akses finansial kepada siswa melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang memungkinkan siswa melanjutkan pendidikan di SMK swasta dengan biaya yang lebih terjangkau.

Skema PPP ini relevan dengan teori yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengurangi beban biaya bagi masyarakat. Dari hasil kualitatif, dapat disimpulkan bahwa keberadaan skema PPP menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan akses pendidikan vokasi di lingkungan Perumnas Klender, yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan SMK Negeri. Oleh karena itu, teori PPP relevan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat memberikan dampak positif dalam konteks pendidikan vokasi di tingkat lokal.

4. Partisipasi Masyarakat: Teori Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Hasil analisis kualitatif juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan skema PPP. Tanpa dukungan masyarakat, program ini mungkin tidak akan berjalan efektif. Dalam konteks ini, teori tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam merancang dan

mengimplementasikan kebijakan pendidikan akan meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut (Cornwall & Gaventa, 2001).

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan vokasi di Perumnas Klender dapat dilihat dalam bentuk dukungan terhadap program KJP Plus dan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi kebijakan. Pengurus RT memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi ini, baik melalui pemberian informasi yang jelas tentang skema PPP, maupun dengan mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dalam proses PPDB. Hasil kualitatif menunjukkan bahwa tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, keberhasilan program pendidikan vokasi ini bisa terhambat.

Teori partisipasi masyarakat ini relevan dengan hasil penelitian, karena menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Dalam hal ini, pengurus RT berfungsi sebagai penggerak utama yang dapat menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung kebijakan pendidikan vokasi.

5. Pengembangan Hipotesis Berdasarkan Temuan Kualitatif

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan teori yang relevan, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat disintesis dengan lebih baik, yakni:

Hipotesis Utama:

"Peran pengurus RT dalam menghubungkan warga dengan program KJP Plus dan SMK swasta berpengaruh positif terhadap peningkatan akses pendidikan vokasi bagi siswa di Perumnas Klender."

1. Teori Peran dan Pengaruhnya terhadap Hipotesis

Hipotesis utama ini berlandaskan pada teori peran sosial (Role Theory) yang dikemukakan oleh Biddle (1986), yang menyatakan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki peran tertentu dalam memenuhi kebutuhan sosial dan membantu mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, pengurus RT di Perumnas Klender memiliki peran ganda sebagai penyambung antara masyarakat dan pihak pemerintah serta pihak SMK swasta. Mereka bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa warga, khususnya siswa yang membutuhkan akses pendidikan, dapat memperoleh informasi yang relevan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan program KJP Plus yang disediakan oleh pemerintah.

Pengurus RT sebagai Agen Perubahan

Sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, pengurus RT berfungsi untuk memberikan informasi dan memfasilitasi proses administratif yang diperlukan untuk mengikuti PPDB, baik di SMK Negeri maupun SMK swasta. Selain itu, mereka juga berperan dalam menjembatani hubungan antara warga dan berbagai program pendidikan yang ada, seperti KJP Plus, yang dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, pengurus RT berfungsi sebagai agen perubahan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan akses pendidikan vokasi bagi siswa di Perumnas Klender.

2. Hasil Kualitatif dan Pengaruhnya terhadap Akses Pendidikan Vokasi

Berdasarkan hasil kualitatif dari penelitian ini, pengurus RT di Perumnas Klender memainkan peran kunci dalam membantu masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan vokasi di SMK swasta. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurus RT tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif menghubungkan warga dengan berbagai sumber daya pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep role enactment dalam teori peran, di mana pengurus RT secara aktif menjalankan peran mereka dalam konteks pendidikan vokasi.

Skema Public Private Partnership (PPP) yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam bentuk bantuan finansial seperti KJP Plus, menjadi kunci dalam meningkatkan akses pendidikan vokasi bagi siswa yang tidak diterima di SMK Negeri. Pengurus RT memainkan peran strategis dengan memfasilitasi akses siswa ke program ini.

Sebagai contoh, mereka membantu warga memahami syarat dan prosedur pendaftaran serta memastikan siswa yang layak mendapat akses ke bantuan finansial yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan di SMK swasta.

3. Pengaruh Positif terhadap Akses Pendidikan Vokasi

Hipotesis ini juga relevan dengan teori partisipasi masyarakat (Cornwall & Gaventa, 2001), yang menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam kebijakan dan program pemerintah akan menghasilkan hasil yang lebih efektif. Dalam hal ini, pengurus RT bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat penuh dari program-program pendidikan yang ada, termasuk KJP Plus.

Dengan keterlibatan aktif pengurus RT, warga menjadi lebih tahu tentang berbagai program yang tersedia dan lebih siap untuk mengaksesnya. Partisipasi mereka dalam mendukung kebijakan pendidikan vokasi, seperti mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMK swasta, tidak hanya memperluas akses tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat diterima oleh siswa.

4. Dampak Positif terhadap Pendidikan Vokasi di Perumnas Klender

Peningkatan akses pendidikan vokasi di Perumnas Klender, sebagaimana dipaparkan dalam hipotesis, bergantung pada adanya keterlibatan aktif pengurus RT dalam mendukung kebijakan pendidikan yang ada. Berdasarkan hasil kualitatif, skema PPP yang melibatkan pengurus RT, pemerintah, dan SMK swasta, memiliki dampak positif terhadap kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMK swasta meskipun terbatasnya kuota di SMK Negeri.

Selain itu, dengan dukungan pengurus RT dalam menyampaikan informasi mengenai KJP Plus, yang mengurangi hambatan biaya pendidikan, siswa yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hal ini menciptakan kesempatan yang lebih merata untuk siswa dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kualitas dan daya saing pendidikan vokasi di Perumnas Klender.

Hipotesis Pendukung:

"Skema Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) yang didukung oleh pengurus RT dapat memperluas akses pendidikan vokasi dengan mengurangi hambatan biaya dan kuota di SMK Negeri."

Hasil kualitatif menunjukkan bahwa PPP memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMK swasta, sekaligus mengatasi keterbatasan yang ada di SMK Negeri. Hal ini mencerminkan relevansi teori PPP dalam memfasilitasi akses pendidikan.

Hipotesis Moderasi:

"Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan vokasi mempercepat keberhasilan implementasi skema PPP di tingkat lokal."

Dengan mengacu pada teori partisipasi masyarakat, hasil kualitatif menunjukkan bahwa tanpa dukungan masyarakat, skema PPP mungkin tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Pada kaitan hasil kualitatif dengan teori-teori yang relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus RT memainkan peran sentral dalam mengatasi masalah PPDB di SMK swasta melalui skema PPP. Teori-teori seperti perubahan sosial-ekonomi, teori peran, teori PPP, dan partisipasi masyarakat membantu memahami bagaimana berbagai faktor saling terkait untuk meningkatkan akses pendidikan vokasi di tingkat lokal. Temuan ini memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya peran aktor kebijakan lokal dalam pendidikan, serta bagaimana kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mengatasi tantangan pendidikan di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran pengurus Rukun Tetangga (RT) 05 RW 05 di Perumnas Klender, Jakarta Timur, dalam mengatasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta melalui model Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP). Penelitian ini difokuskan pada bagaimana keterlibatan pengurus RT, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat meningkatkan akses pendidikan vokasi, khususnya dalam mengatasi keterbatasan kapasitas di SMK Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian, peran pengurus RT terbukti signifikan dalam menjembatani hubungan antara warga dengan program pemerintah, seperti KJP Plus, serta peluang pendidikan yang ditawarkan oleh SMK swasta melalui skema PPP. Hal ini sejalan dengan Teori Manajemen Pendidikan Lokal yang dikembangkan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, di mana keberhasilan kebijakan pendidikan vokasi dapat dicapai melalui desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat. Pengurus RT memainkan peran penting sebagai aktor lokal yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan kebijakan yang ada, sehingga tercipta pendidikan vokasi yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengurus RT berfungsi sebagai fasilitator yang aktif dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan, serta menjadi mediator yang efektif antara warga, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan yang menekankan pentingnya peran aktor lokal dalam memperluas akses pendidikan dan mempercepat pemberdayaan masyarakat. Pengurus RT bertindak sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat mendapatkan informasi, mengakses bantuan keuangan melalui KJP Plus, dan memanfaatkan peluang pendidikan vokasi yang disediakan oleh SMK swasta.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan Teori Inovasi dalam Pendidikan, yang menjelaskan bahwa model Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) dapat menciptakan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah keterbatasan kapasitas pendidikan. Dalam konteks ini, pengurus RT membantu mengoptimalkan pelaksanaan skema PPP dengan memastikan bahwa masyarakat memahami program tersebut dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pengurus RT menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan kuota di SMK Negeri dan memperluas akses pendidikan vokasi. Pengurus RT berperan sebagai penghubung strategis, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat implementasi kebijakan pendidikan di tingkat komunitas, sesuai dengan pendekatan berbasis lokal yang diusulkan oleh Satiadharmanto.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencapai tujuan untuk memahami peran pengurus RT dalam mengatasi masalah PPDB melalui model PPP, tetapi juga menegaskan bahwa pendekatan manajemen pendidikan lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas memiliki dampak positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi di Perumnas Klender.

REFERENSI

- Bennett, N. (2006). *Policy analysis framework and decentralization in education*. Routledge.
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67-92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. *Annual Review of Sociology*, 31(1), 223-243. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122222>

- Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). From users and choosers to makers and shapers: Repositioning participation in social policy. IDS Working Paper No. 127, Institute of Development Studies.
- Gauthier, C., & García-Rubio, J. (2020). The role of public-private partnerships in education in developing countries: A case study approach. Routledge.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-private partnerships: An international performance review. *Public Administration Review*, 67(3), 545-558. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x>
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (1998). Review of community-based research: Assessing partnership approaches to improve public health. *Annual Review of Public Health*, 19, 173-202. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.19.1.173>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing development: Does participation work? World Bank Policy Research Report.
- Mulgan, G., Ali, R., Hallsworth, M., & Sanders, M. (2007). Social innovation: What it is, why it matters, and how it can be accelerated. Young Foundation.
- Miller, R., & Keil, D. (2005). Innovative public-private partnerships in education: Theory and practice. *Education Management and Policy Studies*, 13(2), 12-27.
- Nahrudin, E. (2016). Penerapan model kemitraan pemerintah-swasta dalam pendidikan vokasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(1), 45-60.
- Noddings, N. (2005). The challenge to care in schools: An alternative approach to education. Teachers College Press.
- Patria, N., Amri, M., & Rasyid, A. (2018). Pengelolaan pendidikan berbasis komunitas: Pendekatan inklusif untuk pendidikan yang lebih adil. Jakarta: Kencana.
- Raharja, U. (2019). Pendidikan vokasi dan keterkaitannya dengan dunia industri. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 4(2), 115-125.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Swanepoel, H., & De Beer, F. (2006). Community development: Breaking the cycle of poverty. Juta and Company Ltd.
- Verawadina, D., Jalinus, I., & Asnur, M. (2019a). Pendidikan vokasi untuk daya saing di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 12(1), 20-30.
- Howaldt, J., & Schwarz, M. (2010). Social innovation: Concepts, research fields, and international trends. *Journal of Social Science Research*, 18(1), 29-43. <https://doi.org/10.1177/2158244010388017>